

ANALISIS DISTRIBUSI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR

Sitti Rahmah¹, Muhammad Riski²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Sittir517@gmail.com

Abstract

This research was conducted in Tanjung Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency. The aim of this research is to determine the distribution and obstacles in the Direct Cash Assistance (BLT) Program in Tanjung Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency. Data obtained from this research was through observation, interviews and documentation studies. Based on the research conducted, it was found that the village head initially held a village meeting regarding the names of the heads of families who would receive assistance. Furthermore, there were complaints from the public regarding the names of family heads who were entitled to receive aid. Distribution of the BLT program is carried out in accordance with the agreed data collection stages. The obstacles faced in the distribution of the Direct Cash Assistance (BLT) Program in Tanjung Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency are that data collection on recipient communities is still not on target, because it is based on the names of the closest people proposed by village officials and does not pay attention to the community. the less fortunate who have not received assistance such as: BLT, PKH, Raskin and other social assistance.

Keywords: *Distribution, BLT Program, Poverty*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Distribusi dan kendala dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Data yang diperoleh dari penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kepala desa awalnya melakukan musyawarah desa mengenai nama-nama Kepala Keluarga yang akan menerima bantuan. Selanjutnya adanya keluhan dari masyarakat terkait nama-nama Kepala Keluarga yang berhak sebagai penerima bantuan. Pendistribusian program BLT dilakukan sesuai dengan tahap pendataan yang telah disepakati. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Distribusi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar yaitu pendataan masyarakat penerima masih belum tepat sasaran, karena berdasarkan nama-nama orang terdekat yang diusulkan oleh perangkat desa dan tidak memperhatikan masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan seperti: BLT, PKH, Raskin dan bansos lainnya.

Kata kunci: *Distribusi, Program BLT, Kemiskinan*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih sulit dipecahkan hampir disetiap Negara termasuk Negara Indonesia. Indonesia salah satu Negara yang sedang berkembang yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi, tetapi belum mampu mengatasi kemiskinan. Penduduk miskin ialah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Ini berarti bahwa ketidakmampuan dari sisi pengeluaran dan pendapatan untuk hidup layak minimum. Salah satu sebab dari kemiskinan ialah karena kurangnya pendapatan dan asset untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menunjang kehidupan seperti makanan, pakaian, pekerjaan, kesehatan serta pendidikan yang dapat diterima.

Pada umumnya di Negara berkembang seperti Indonesia masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Tujuan dilakukan pembangunan ekonomi agar terciptanya kemakmuran masyarakat dalam mengatasi masalah pembangunan dan sosial masyarakat seperti kemiskinan. Masalah kemiskinan memang merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, letak geografis, kondisi lingkungan, dan lain-lain.

Masalah kemiskinan di beberapa daerah di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda dari sisi jumlah maupun presentasinya. Jumlah penduduk, letak geografis, kondisi lingkungan, hingga kebijakan daerah masing- masing dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di suatu daerah yaitu pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto, dan pendidikan. Ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah maka akan berpengaruh pada daya beli dan daya saing akan rendah, sehingga memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat pangan, dan kesehatan serta tempat tinggal yang layak, sehingga menyebabkan bertambahnya penduduk miskin pada suatu daerah.

Kemiskinan dalam wikipedia merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan berbagai hal, baik rendahnya tingkat pengetahuan maupun tidak adanya akses terhadap pekerjaan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai makhluk hidup.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi masalah kemiskinan, hal tersebut didorong oleh semakin banyaknya jumlah populasi

penduduk. Meski menjadi salah satu provinsi yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, tetapi angka kemiskinan di Provinsi Riau masih terbilang cukup tinggi. Capaian angka kemiskinan di Provinsi Riau berdasarkan data (BPS, Maret 2023) dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 658.611,- per kapita per bulan, sedangkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sebesar 6,68% atau 485,66 ribu jiwa.

Dalam menurunkan presentase penduduk miskin di Kabupaten Kampar pemerintah telah melakukan beberapa program. Salah satu program yang dilakukan adalah program bantuan langsung tunai (BLT) guna untuk menurunkan angka kemiskinan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa. Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang terdiri dari 7 dusun yaitu dusun satu, dusun dua, dusun tiga, dusun empat, dusun lima, dusun enam, dan yang terakhir dusun tujuh.

**Tabel 1 Jumlah Kepala Keluarga di Desa Tanjung
Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah KK Desa Tanjung
1	2019	1.572 KK
2	2020	1.587 KK
3	2021	1.594 KK
4	2022	1.603 KK
5	2023	1.614 KK

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

Berdasarkan data diatas jumlah Kepala Keluarga di Desa Tanjung pada tahun 2019 berjumlah 1.572 KK, tahun 2020 berjumlah 1.587 KK, tahun 2021 berjumlah 1.594 KK, tahun 2022 berjumlah 1.603 KK, dan pada tahun 2023 berjumlah 1.614 KK. Kementerian Desa mengeluarkan Permendes No. 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 merupakan dari BLT Dana Desa.

**Tabel 2
Data Jumlah BLT yang Diterima Masyarakat Desa Tanjung
Kecamatan Koto Kampar Hulu**

No	Dusun	Nominal
1	I	Rp. 300.000

2	II	Rp. 300.000
3	III	Rp. 300.000
4	IV	Rp. 300.000
5	V	Rp. 300.000
6	VI	Rp. 300.000
7	VII	Rp. 300.000

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa data jumlah BLT yang diterima masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar hulu, Kabupaten Kampar Desa terdapat 8 Dusun dengan nominal bantuan senilai Rp.300.0000. Kriteria penerima BLT adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis.

Pendataan calon penerima BLT Dana Desa, dilakukan dengan cara survey ke lokasi program untuk mendapatkan data rumah tangga miskin. Data yang di dapatkan tersebut akan di saring terlebih dahulu berdasarkan syarat penerima BLT Dana Desa. Dengan hal ini yang memilih penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah perangkat desa itu sendiri. Dalam mekanisme pelaksanaannya, pemerintah akan menghimpun data terlebih dahulu, masyarakat mana saja yang masuk dalam prioritas penerima BLT Dana Desa. Berikut adalah mekanisme dan prosedur pendataan penerima BLT Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh pendataan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa.
2. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data.
3. Setelah melakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa.
4. Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Wali Kota melalui Camat.
5. Terakhir, program BLT Dana Desa bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

Namun kehadiran program tersebut terdapat banyaknya problematika. Seperti tidak tepatnya sasaran penerima bantuan langsung tunai (BLT) tersebut, menimbulkan konflik sosial antar masyarakat. Berdasarkan Fenomena yang terjadi. Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut diberikan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan yang tidak ditetapkan. Misalnya seperti bantuan tersebut diberikan kepada orang terdekat yang menjabat di desa sementara masih banyak warga atau masyarakat yang lebih membutuhkan manfaat dari bantuan langsung tunai tersebut. Sehingga masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tersebut tetap hidup dalam kekurangan. Perilaku ini termasuk tidak adil dalam pembagian BLT yang terjadi, dapat memicu konflik antar masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada pemimpinnya.

**Tabel 3 Jumlah Penerima BLT Dana Desa di Desa Tanjung
Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah Penerima BLT Dana Desa
1	2019	90 KPM
2	2020	70 KPM
3	2021	117 KPM
4	2022	50 KPM
5	2023	50 KPM

Sumber: Kepala Desa Tanjung, 2024

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BLT Dana Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu pada tahun 2019 sebanyak 90 KPM, tahun 2020 sebanyak 70 KPM, tahun 2021 sebanyak 117 KPM, tahun 2022 sebanyak 50 KPM dan terakhir tahun 2023 sebanyak 50 KPM. Sehingga masih banyak masyarakat yang berkategori miskin yang tidak mendapatkan BLT Dana Desa. Banyak dari mereka yang mendapat bantuan tidak sesuai dengan keadaan ataupun pekerjaan mereka.

Selain itu banyak masalah yang terjadi karena masyarakat penerima bantuan langsung tunai menyalahgunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak diperlukan akibat dari salah sasaran bantuan tersebut. Padahal tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dikeluarkan kepada pemerintah melalui Kementerian Sosial (KEMENSOS) untuk diharapkan membantu atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ekonomi menurun untuk masyarakat miskin, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di seluruh penjuru atau daerah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti selama proses observasi di beberapa masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu terdapat permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat terkait distribusi BLT antara lain: 1) Pemerintah Desa belum bisa menerapkan kriteria penerima BLT berdasarkan kriteria nasional. 2) Dasar penentuan penerima BLT lebih mengutamakan data penerima BLT tahun sebelumnya, yang juga berdasarkan atas pertimbangan dari pihak Kepala Dusun setempat yang dinilai cukup mengetahui kondisi ekonomi dari padaarganya tersebut. 3) selain itu, permasalahan yang selanjutnya penerima dari bantuan lain seperti sembako dan PKH masih juga menerima BLT. Dengan adanya hal ini, sehingga menimbulkan konflik dan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa menjadi berkurang. Dengan kondisi serba kesulitan menimbulkan kecemburuan sosial dan berdampak ketidakadilan dan perselisihan.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Distribusi

Dalam KBBI arti distribusi ialah penyaluran (pembagian, pengiriman) barang-barang kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.

Afzalurrahman (2016) mengemukakan bahwa distribusi adalah kegiatan penyaluran kekayaan sumber daya yang bermanfaat baik bagi individu, masyarakat maupun Negara.

Program Bantuan Langsung Tunai

Menurut (Suharto Edi, 2009) BLT Desa adalah program kompensasi jangka pendek yang di keluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu.

Kemiskinan

Kemiskinan menurut KBBI berasal dari kata miskin yang memiliki arti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah) atau suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang secara ekonomi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemiskinan ini ditandai dengan masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan, dan keterpurukan, yang disebabkan oleh perubahan sosial diantaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang

semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok) (Mudrajad Kuncoro, 2002)

Yulianto Kadji (2017) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kemudian menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bintarto (2016) menyebut bahwa desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya.

Dana Desa

Dana Desa merupakan sumber dana yang dimiliki desa yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan desa menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dana Desa dianggarkan APBN setiap tahun melalui transfer ke APBD Kabupaten/Kota untuk dialokasikan ke desa-desa di wilayahnya masing-masing (Oktara, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan, di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Jenis dan Sumber Data

Sumber Data Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif instrument utamanya adalah penelitian sendiri, untuk mencari data berinteraksi secara simbolik dengan informan/subyek yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak apabila teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Informan Penelitian

Yang menjadi Informan Penelitian Kepala Desa, Kepala Dusun, RT, Masyarakat yang mendapatkan BLT dan Masyarakat yang tidak mendapatkan BLT.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga bisa mengumpulkan data yang dibutuhkan, oleh karena itu tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data antara lain: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan serta Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mekanisme pendataan penerima BLT, desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai referensi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima Jaring Pengamat Sosial (JPS) tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Tujuan pertama Pendistribusi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar yaitu dalam membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar diharapkan keluarga penerima manfaat (KPM) menggunakan bantuan ini dengan bijak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebelum masyarakat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa, perangkat desa, kepala dusun masing-masing dan Babinsa sebagai pendampingan dan monitoring penyaluran pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Tujuan kedua Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar ialah Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak sepenuhnya menjamin kesejahteraan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, perangkat desa sudah mengupayakan beberapa masyarakatnya yang masuk kategori menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut, dan masih banyak lagi bansos lainnya yang bisa diterima dengan masing-masing kriteria yang harus terpenuhi oleh masyarakat. Untuk masyarakat yang betul-betul kesulitan ekonominya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan adanya laporan warga langsung atau orang yang memberitahu keadaan orang terdekatnya terhadap ketua RW mengenai warga yang sedang betul-betul kesulitan ekonomi akan ditindak lanjuti dengan laporang tersebut diberitahukan kepada kepala dusun.

Tujuan ketiga Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial Bersama bahwa daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar hulu, Kabupaten Kampar dari tabel terlihat sedikit hanya 35 (Tiga puluh lima) keluarga penerima manfaat (KPM). Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) merasa bersyukur dengan adanya bantuan ini dapat membantu kebutuhan dapur mereka. Dan untuk waktu penerimaan BLT dianggap masyarakat kurang jelas, tahun lalu penerima mendapatkan bantuan tiap bulan sedangkan tahun ini langsung per tiga bulan, sehingga mesyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya bisa mengikuti peraturan yang berlaku dan himbauan informasi terkait pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Sasaran pertama Distribusi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar adalah Tidak Mendapat Bantuan Program PKH, BPNT atau Pemilik Kartu Prakerja. Masyarakat berpendapat bahwa masih ada warga yang mendapatkan 2 (dua) jenis bantuan yang berbeda, terutama bantuan BLT. jika sudah mendapatkan bantuan seperti: PKH, BPNT, dan Pemilik Kartu Prakerja, maka ia tidak berhak lagi mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebaiknya perangkat desa lebih teliti dalam proses pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

dan memastikan daftar nama-nama Calon Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut tidak terdaftar di bantuan sosial lainnya.

Sasaran kedua Distribusi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar adalah Masyarakat Mengalami Kehilangan Mata Pencarian (Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 bulan ke depan). Masyarakat berpendapat orang yang tidak memiliki pekerjaan atau hanya mengharapkan bisa bekerja sama orang lain. berhak mendapatkan bantuan dengan alasan kurang mampu karena masih memiliki anak-anak yang masih bersekolah. Hal ini dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Sasaran ketiga Distribusi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar adalah Mempunyai Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis. Masyarakat berpendapat bahwa perangkat desa lebih mendahulukan keluarganya untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kurangnya memperhatikan keluarga yang kurang mampu dengan memiliki riwayat sakit sudah bertahun-tahun. Seharusnya perangkat desa harus lebih adil terhadap masyarakat biasa maupun keluarga dekatnya mengenai penerima bantuan.

Sasaran keempat Distribusi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar adalah Tim Pendata Harus Memastikan Kelompok Rentan Seperti Keluarga Miskin Yang Dikepalai Oleh Perempuan, Lansia, Dan Penyandang Disabilitas. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Distribusi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar yaitu: Pertama, waktu penerimaan program BLT di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu kurang jelas dan nama-nama penerima bantuan tahap demi tahap kebanyakan orang lama apalagi pergantian penerima hanya boleh karena meninggal dunia. Kedua, perangkat desa kurang teliti dalam mendata nama-nama masyarakat yang belum menerima bantuan sama sekali atau yang lebih berhak menerima agar bantuan BLT di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu tepat sasaran.

SIMPULAN

Tujuan Distribusi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar yaitu: Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan sesuai dengan keluarga yang berhak menerima manfaat tersebut. Keluarga yang sudah menerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

tidak boleh menerima program lain dan memanfaatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kebutuhan keluarga bukan untuk kepentingan konsumtif.

Sasaran Distribusi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar yaitu: Keluarga Penerima Manfaat yang mengalami kehilangan mata pencarian (Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 bulan ke depan). Mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dan Tim Pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh Perempuan, Lansia, Dan Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alba, Amru, Rudi Kurniawa. (2019). *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*. Sulawesi: Unimal Press
- Alsukri, S. (2020). Implementasi program keluarga harapan (PKH) terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) Di Kota pekanbaru. *J. Ilm. Muqoddimah J. Ilmu Sos. Polit. dan Hummanioramania*, 4(1), 26.
- Amalina, Dian. 2018. "Efektivitas Program Bantuan Pangan Pengeluaran Pangan Rumah Tangga di Kelurahan Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang." 3-4
- Al-Qur'an Q.S Al-Hasyr ayat 7
- Bintarto. 2016. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Desrinalti, Desrinalti dan Afifah, Maghfirah dan Gistuati, Nurhizrah. (2021). "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan" dalam Jurnal Riset Tindakan Indonesia. Vol. 6 No. 1. Universitas Negeri Padang.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah Mada. Yogyakarta.
- Girsang, Wardis. 2011. *Kemiskinan Multidimensial Di Pulau-Pulau Kecil*. Ambon: Badan Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Pattimura
- Hasbi, Imanuddin. 2021. *Kebijakan Publik*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ismail, Asep Usman. 2015. "Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an An. 4(1):45-57.
- Itang. n.d. "Penyebab Kemiskinan dan Cara Menanggulangnya." 1-25
- Mujahiddin, Ananda Mahardika. 2017. *Perempuan Dan Kemiskinan*. UMSU-PRESS.
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutiko Prio. Yogyakarta.

- Pajriah, S. (2015). "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan di Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Ciamis." 1. 83-88.
- Permendes No. 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Prayitno, dan Erman. (2008) *Dasar-Dasar Bimbingan dan konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. n.d. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." 1-2.
- Sore, Uddim B, Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makasar: CV. SAH MED.
- Suharto Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Cetakan 1*. Bandung: Alfabeta
- Tarigan, Herlina, Juni H. Sinaga, and Rika R. Rachmawati. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." (3): 457-79
- Wahab, Solichin A. (2014) *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*: Yogyakarta: Media Pressindo